

# Gender dan Kerentanan Pekerja Anak di Kota Makassar

*Gender and Child Labour Vulnerability in Makassar City*

**Abd Naris Agam\*, Sartika Dwi Hardiyanti**

Universitas Teknologi Sulawesi, Indonesia

\* [narissarbat86@gmail.com](mailto:narissarbat86@gmail.com) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

This article examines gendered vulnerability to child labour in Makassar City using empirical secondary data from official statistics and local social-sector records. The study applies a descriptive quantitative approach supported by document analysis of Sakernas 2024, BPS Makassar publications, BPS national child-labour tables, and Satu Data Makassar social data. It also uses an indicative estimation approach by applying the provincial child-labour prevalence to the estimated population aged 10-17 in Makassar; therefore, the estimate is interpreted as a vulnerability signal rather than an official city-level count. The findings show that Makassar has a large adolescent population, while South Sulawesi recorded a relatively high child-labour prevalence of 5.28 percent in 2024. Gendered labour-market patterns are evident: women's labour-force participation is far below men's, and women are highly concentrated in unpaid household responsibilities. Local records also show child street, neglected-child, and violence cases that require integrated social welfare responses. The article argues that child-labour prevention in Makassar should combine household economic protection, gender-sensitive case management, school retention, and community-based outreach.

### Keywords

child labor; gender; Makassar; social welfare; urban vulnerability

### Article History

Received: 2026-06-21  
Accepted: 2026-06-26

---

Copyright © 2026, Agam et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.583](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.583)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan masalah kesejahteraan sosial karena melibatkan relasi antara kemiskinan rumah tangga, akses pendidikan, perlindungan anak, dan ketimpangan gender dalam pembagian kerja. Pada konteks perkotaan, masalah tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk hubungan kerja formal, tetapi juga melalui pekerjaan informal keluarga, aktivitas ekonomi di jalan, kerja jasa kecil, pekerjaan domestik berbayar maupun tidak berbayar, serta aktivitas ekonomi yang tersembunyi. Karena itu, isu gender dan pekerja anak tidak cukup dipahami sebagai persoalan ketenagakerjaan semata, melainkan sebagai kerentanan sosial yang menuntut intervensi pekerjaan sosial, perlindungan anak, dan kebijakan kesejahteraan berbasis keluarga.

Secara global, ILO dan UNICEF memperkirakan hampir 138 juta anak masih berada dalam pekerja anak pada 2024, termasuk sekitar 54 juta anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Data global tersebut juga memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih menjadi lokasi terbesar pekerja anak, tetapi jasa dan industri tetap penting dalam konteks urban. Dari sisi gender, anak laki-laki lebih sering tercatat dalam pekerja anak, sedangkan kerja perawatan dan pekerjaan rumah tangga tidak berbayar yang banyak dilakukan anak perempuan sering tidak terlihat dalam statistik pasar kerja (International Labour Organization [ILO] & UNICEF, 2025). Dengan demikian, analisis gender penting karena statistik pekerja anak dapat meremehkan beban kerja anak perempuan apabila definisi kerja hanya menekankan aktivitas ekonomi yang menghasilkan upah atau keuntungan.

Di Indonesia, regulasi ketenagakerjaan pada prinsipnya melarang pengusaha mempekerjakan anak, tetapi masih memberikan pengecualian terbatas bagi pekerjaan ringan untuk anak usia 13 sampai 15 tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan pendidikan anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (Pemerintah Republik Indonesia, 2000). Walaupun kerangka hukum sudah tersedia, tantangan implementasi tetap kuat karena banyak bentuk pekerja anak berada di sektor informal, ruang keluarga, ruang jalanan, dan relasi ekonomi yang sulit diawasi.

Kota Makassar relevan dikaji karena merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia dan menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, serta migrasi perkotaan. Dalam situasi demikian, anak dari rumah tangga rentan dapat berhadapan dengan dua tekanan sekaligus: kebutuhan ekonomi keluarga dan peluang kerja informal perkotaan. Data BPS Kota Makassar menunjukkan bahwa penduduk usia 10-19 tahun pada 2024 mencapai sekitar 268.663 jiwa, terdiri atas kelompok 10-14 tahun sebanyak 132.860 jiwa dan kelompok 15-19 tahun sebanyak 135.803 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2025a). Jumlah remaja yang besar ini merupakan modal demografis, tetapi juga dapat menjadi kelompok rentan apabila perlindungan keluarga, pendidikan, dan layanan sosial tidak berjalan efektif.

Penelitian sebelumnya telah menempatkan kemiskinan, pendidikan orang tua, status sekolah anak, dan pekerjaan kepala rumah tangga sebagai faktor yang berkaitan dengan pekerja anak. Studi berbasis data nasional menunjukkan bahwa status kemiskinan rumah tangga dapat meningkatkan peluang anak bekerja (Utami & Usman, 2022), sementara penelitian lain menekankan bahwa tekanan ekonomi setelah pandemi dapat membuat pekerja anak tetap bertahan meskipun sekolah telah dibuka kembali (Bunda & Zulkifli, 2025). Penelitian tentang pekerja anak perempuan di sektor informal perkotaan juga menunjukkan bahwa norma sosial, kemiskinan keluarga, dan keterbatasan akses pendidikan dapat memerangkap anak perempuan dalam siklus kerentanan (Ginting & Barus, 2025).

Pada konteks Makassar, penelitian mengenai anak jalanan dan layanan sosial menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan pendataan dan pembinaan, tetapi masih menghadapi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, sumber daya, dan kesinambungan pendampingan (Sakir et al., 2023; Solong et al., 2023). Literatur tersebut memberi gambaran penting mengenai anak jalanan, tetapi belum secara khusus menggabungkan analisis gender, data ketenagakerjaan, data sosial kota, dan estimasi kerentanan pekerja anak dalam satu naskah yang diarahkan untuk Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan profil empiris kerentanan pekerja anak di Kota Makassar dengan menggabungkan tiga lapis data: struktur demografis anak dan remaja, struktur ketenagakerjaan berbasis gender, serta data sektoral Dinas Sosial terkait anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan korban kekerasan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis bagaimana gender membentuk kerentanan pekerja anak di Kota Makassar dan merumuskan implikasi program kesejahteraan sosial yang lebih responsif terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder, dilengkapi analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal, melainkan menyusun profil empiris dan membaca pola kerentanan sosial berdasarkan data resmi yang tersedia. Data yang digunakan meliputi Statistik Ketenagakerjaan Kota Makassar 2024 berbasis Sakernas Agustus 2024, Kota Makassar Dalam Angka 2025, tabel BPS tentang persentase pekerja anak usia 10-17 tahun menurut provinsi, rilis BPS Sulawesi Selatan terkait kemiskinan, serta Satu Data Kota Makassar kategori sosial yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Unit analisis penelitian adalah Kota Makassar, sedangkan variabel yang dibaca meliputi penduduk usia 10-19 tahun, indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin, kegiatan bukan angkatan kerja, jam kerja penduduk bekerja, dan data sosial anak yang relevan dengan risiko eksploitasi ekonomi. Karena data resmi pekerja anak pada tingkat kota tidak tersedia secara terbuka, artikel ini tidak mengklaim jumlah pekerja anak aktual di Makassar. Artikel ini hanya menyajikan estimasi indikatif risiko dengan mengalikan prevalensi pekerja anak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 terhadap perkiraan penduduk usia 10-17 tahun Kota Makassar. Estimasi ini didasarkan pada tiga asumsi: distribusi umur 15-19 tahun diperlakukan proporsional untuk memperkirakan usia 10-17 tahun; prevalensi provinsi digunakan sebagai proksi sementara karena tidak tersedia prevalensi kota; dan definisi pekerja anak yang digunakan mengikuti kerangka statistik BPS sehingga dapat dibandingkan secara terbatas. Dengan asumsi tersebut, estimasi digunakan sebagai alat baca kerentanan, bukan sebagai angka resmi pemerintah kota, serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan survei rumah tangga atau pendataan kasus langsung.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data kependudukan dan ketenagakerjaan disusun kembali menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kedua, data sosial anak dari Satu Data Kota Makassar dibandingkan antara 2022 dan 2024 untuk melihat arah perubahan masalah sosial. Ketiga, data pekerja anak provinsi ditempatkan sebagai konteks risiko karena pekerja anak pada tingkat kabupaten/kota tidak tersedia secara langsung. Keempat, seluruh temuan ditafsirkan menggunakan perspektif kesejahteraan sosial dan gender, terutama pada dimensi perlindungan anak, beban kerja tidak terlihat, akses pendidikan, dan kebutuhan layanan sosial berbasis keluarga.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder yang tidak memungkinkan peneliti mengidentifikasi identitas, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, durasi kerja, dan relasi keluarga masing-masing anak. Karena itu, hasil penelitian harus dibaca sebagai pemetaan awal berbasis data resmi. Penelitian lanjutan tetap membutuhkan

survei rumah tangga, wawancara anak dan keluarga, serta penelusuran kasus pada titik-titik kerja informal, pasar, jalan, pesisir, dan pusat jasa perkotaan di Kota Makassar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Struktur demografis anak dan remaja sebagai basis kerentanan

Kelompok usia 10-19 tahun merupakan kelompok yang paling dekat dengan definisi pekerja anak usia 10-17 tahun. Data BPS Kota Makassar 2024 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun berjumlah 132.860 jiwa, sedangkan kelompok 15-19 tahun berjumlah 135.803 jiwa. Jika kelompok usia 15-19 tahun diperkirakan secara proporsional untuk usia 15-17 tahun, maka penduduk usia 10-17 tahun di Kota Makassar dapat diperkirakan sekitar 214.342 jiwa. Jumlah tersebut bukan angka resmi usia tunggal, tetapi estimasi yang berguna untuk membaca besarnya populasi anak yang berada pada rentang risiko pekerja anak.

**Tabel 1.** Penduduk usia 10-19 tahun menurut jenis kelamin di Kota Makassar, 2024

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10-14 tahun	68.702	64.158	132.860 (49,45%)
15-19 tahun	70.264	65.539	135.803 (50,55%)
Total 10-19 tahun	138.966	129.697	268.663 (100,00%)

Sumber: BPS Kota Makassar, Kota Makassar Dalam Angka 2025; tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, 2024. Persentase pada kolom jumlah dihitung dari total penduduk usia 10-19 tahun.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa proporsi laki-laki sedikit lebih besar daripada perempuan pada kelompok usia 10-19 tahun. Struktur ini penting karena data global dan nasional sering menunjukkan anak laki-laki lebih terlihat dalam aktivitas ekonomi, khususnya pekerjaan berupah dan pekerjaan luar rumah. Namun, perspektif gender mengingatkan bahwa anak perempuan sering berada pada kerja yang lebih tersembunyi, terutama pekerjaan domestik, pengasuhan adik, membantu usaha keluarga, atau kerja jasa yang tidak selalu tercatat sebagai pekerjaan formal. Dengan demikian, populasi anak dan remaja Makassar perlu dilihat bukan hanya sebagai angka demografis, tetapi sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan pendidikan dan sosial sejak dini.

Apabila prevalensi pekerja anak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar 5,28 persen diterapkan secara indikatif pada estimasi penduduk usia 10-17 tahun Makassar, maka terdapat sekitar 11.317 anak yang secara statistik berada dalam lingkup risiko pekerja anak. Angka ini harus dibaca sangat hati-hati karena prevalensi provinsi tidak otomatis sama dengan kondisi kota. Makassar memiliki karakter ekonomi urban yang lebih kuat pada sektor perdagangan, jasa, pendidikan, transportasi, dan pekerjaan informal perkotaan, sedangkan angka provinsi juga mencakup wilayah rural, pesisir, dan pertanian yang memiliki pola pekerja anak berbeda. Perbedaan struktur ekonomi, kepadatan penduduk, akses sekolah, kemiskinan rumah tangga, dan intensitas layanan sosial dapat membuat angka indikatif tersebut lebih tinggi atau lebih rendah daripada situasi aktual di Kota Makassar. Namun, estimasi tersebut tetap menunjukkan bahwa isu pekerja anak bukan masalah kecil dalam konteks kota besar seperti Makassar, terutama jika dikaitkan dengan anak jalanan, pengemis anak, pekerjaan informal keluarga, dan sektor jasa perkotaan.

### 3.2. Ketimpangan gender dalam pasar kerja dan kerja perawatan keluarga

Data Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kota Makassar mencapai 1.123.230 orang. Dari jumlah tersebut, 696.851 orang termasuk angkatan kerja dan 426.379 orang bukan angkatan kerja. Ketika data dipisahkan menurut jenis kelamin, tampak perbedaan yang sangat besar: TPAK laki-laki sebesar 77,44 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 47,06 persen. Selisih TPAK laki-laki dan perempuan mencapai 30,38 poin persentase, sehingga partisipasi angkatan kerja laki-laki sekitar 1,65 kali partisipasi perempuan. Perbedaan ini bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan cerminan pembagian peran gender dalam keluarga dan masyarakat.

**Tabel 2.** Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama dan jenis kelamin, 2024

Kegiatan utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan kerja	428.911	267.940	696.851
- Bekerja	397.858	231.325	629.183
- Pengangguran	31.053	36.615	67.668
Bukan angkatan kerja	124.937	301.442	426.379
- Sekolah	61.276	55.011	151.801
- Mengurus rumah tangga	21.763	229.604	280.306
- Lainnya	41.898	16.827	69.254
Total	553.848	569.382	1.123.230

Sumber: BPS Kota Makassar, Statistik Ketenagakerjaan Kota Makassar 2024, Sakernas Agustus 2024.

Tabel 2 menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak berada dalam kategori bukan angkatan kerja, terutama karena mengurus rumah tangga. Perempuan yang tercatat mengurus rumah tangga mencapai 229.604 orang, sedangkan laki-laki hanya 21.763 orang; rasionya sekitar 10,55 kali lebih besar pada perempuan. Pola ini penting bagi analisis pekerja anak karena beban kerja perawatan keluarga sering diturunkan kepada anak perempuan, terutama pada rumah tangga miskin atau keluarga dengan orang tua yang bekerja panjang di sektor informal. Anak perempuan dapat tetap bersekolah, tetapi juga memikul kerja rumah tangga dan pengasuhan yang mengurangi waktu belajar, istirahat, dan partisipasi sosialnya.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pekerja anak tidak selalu identik dengan anak yang bekerja di pabrik atau menerima upah harian. Anak yang membantu pekerjaan ekonomi keluarga, menjadi pengasuh adik agar orang tua bekerja, atau bekerja di usaha kecil keluarga juga dapat mengalami kehilangan hak dasar apabila pekerjaan tersebut mengganggu sekolah, kesehatan, dan perkembangan psikososial. Oleh sebab itu, ketimpangan gender pada pasar kerja orang dewasa dapat menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana kerentanan anak dibentuk oleh struktur keluarga dan ekonomi kota.

### 3.3. Data sosial anak di Kota Makassar dan hubungan dengan risiko eksploitasi ekonomi

Data sektoral Dinas Sosial Kota Makassar melalui Satu Data memperlihatkan beberapa kategori masalah sosial anak yang beririsan dengan risiko pekerja anak. Pada 2024, jumlah anak jalanan tercatat 140 orang, anak terlantar 140 orang, anak berhadapan dengan hukum 40 orang, anak dengan kedisabilitas 263 orang, dan anak korban kekerasan 40 orang.

Data ini tidak dapat disamakan dengan jumlah pekerja anak, tetapi menjadi indikator penting karena anak jalanan, anak terlantar, dan anak korban kekerasan memiliki risiko lebih besar masuk ke pekerjaan informal, eksploitasi ekonomi, atau pekerjaan yang membahayakan.

**Tabel 3.** Data sosial anak dan kerentanan perlindungan anak di Kota Makassar

Indikator	2022	2024	Arah perubahan
Anak terlantar	200	140	Menurun 30,0%
Anak berhadapan dengan hukum	95	40	Menurun 57,9%
Anak jalanan	501	140	Menurun 72,1%
Anak dengan disabilitas	442	263	Menurun 40,5%
Anak korban kekerasan	7	40	Meningkat 471,4%

Sumber: Satu Data Kota Makassar, kategori sosial, OPD/Instansi Dinas Sosial Kota Makassar.

Penurunan anak jalanan dari 501 pada 2022 menjadi 140 pada 2024 dapat dibaca sebagai sinyal positif, tetapi tidak boleh langsung disimpulkan sebagai hilangnya kerentanan. Data sosial sangat dipengaruhi oleh mekanisme pendataan, operasi penjangkauan, akses keluarga terhadap layanan, penyempurnaan sistem pencatatan, pelaporan lintas OPD, serta perubahan kebijakan penertiban, pembinaan, atau rehabilitasi sosial di tingkat daerah. Pada saat yang sama, kenaikan anak korban kekerasan dari 7 menjadi 40 kasus menunjukkan bahwa kerentanan anak dapat berpindah bentuk: tidak hanya hadir di jalan, tetapi juga di rumah, komunitas, dan relasi sosial yang tersembunyi. Kenaikan data korban kekerasan penting karena anak yang mengalami kekerasan lebih rentan meninggalkan rumah, putus sekolah, atau masuk ke pekerjaan informal sebagai strategi bertahan hidup.

Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang strategi Dinas Sosial Kota Makassar yang menyebutkan bahwa penanganan anak jalanan dilakukan melalui pendataan dan pembinaan, tetapi masih menghadapi hambatan fasilitas dan pusat rehabilitasi yang belum memadai (Sakir et al., 2023). Kajian lain mengenai kebijakan layanan sosial anak jalanan di Makassar menekankan perlunya pendekatan berbasis jalan, komunitas, dan pusat layanan agar anak dapat dikembalikan kepada keluarga serta memperoleh pemulihan fisik, psikologis, dan sosial (Solong et al., 2023). Integrasi data demografis, ketenagakerjaan gender, dan data sosial anak menghasilkan temuan konseptual bahwa kerentanan pekerja anak di Makassar bekerja sebagai rantai kerentanan perkotaan: besarnya populasi anak menjadi basis paparan, ketimpangan gender dalam kerja orang dewasa menjadi mekanisme reproduksi beban keluarga, sedangkan data anak jalanan, anak terlantar, dan korban kekerasan menjadi manifestasi masalah perlindungan anak. Dengan demikian, pekerja anak perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak, bukan sebagai kasus ekonomi individual.

### 3.4. Jam kerja, sektor informal, dan kerentanan anak dalam keluarga pekerja

Meskipun data jam kerja BPS Kota Makassar tersedia untuk penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas, pola tersebut tetap membantu menjelaskan struktur kerja informal dan rentan di kota. Data 2024 menunjukkan bahwa pekerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jam kerja pendek dibanding laki-laki. Jika kategori 1-34 jam kerja seminggu dipakai sebagai indikator kerja tidak penuh, maka pekerja perempuan pada kategori tersebut mencapai

51.533 orang atau sekitar 22,28 persen dari seluruh pekerja perempuan. Pada laki-laki, angka tersebut 39.960 orang atau sekitar 10,04 persen dari seluruh pekerja laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak berada pada kerja yang fleksibel, parsial, atau tidak penuh, yang sering berhubungan dengan beban domestik.

**Tabel 4.** Penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas menurut jam kerja dan jenis kelamin, 2024

Jam kerja per minggu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 jam*)	12.169	4.302	16.471
1-14 jam	17.970	21.553	39.523
15-34 jam	21.990	29.980	51.970
35 jam ke atas	345.729	175.490	521.219
Total	397.858	231.325	629.183

Sumber: BPS Kota Makassar, Statistik Ketenagakerjaan Kota Makassar 2024, Sakernas Agustus 2024.

Catatan: 0 jam merujuk pada sementara tidak bekerja.

Pola jam kerja orang dewasa relevan terhadap pekerja anak karena keluarga dengan pekerjaan tidak penuh dan pendapatan tidak stabil sering membutuhkan kontribusi tambahan dari anggota keluarga lain. Pada keluarga miskin, kontribusi tersebut bisa berbentuk anak membantu berdagang, menjaga lapak, mengumpulkan barang bekas, bekerja di rumah makan, membantu pekerjaan domestik, atau terlibat dalam aktivitas jalanan. Anak laki-laki cenderung lebih terlihat dalam kerja luar rumah, sedangkan anak perempuan lebih rentan berada pada kombinasi antara kerja domestik dan kerja jasa yang tidak selalu dikenali sebagai pekerja anak.

Temuan tersebut selaras dengan kajian Sukma dan Ruslan (2025) yang menunjukkan bahwa jam kerja pekerja anak dapat dipengaruhi oleh penggunaan perangkat digital dan keterlibatan anak dalam sektor jasa. Dalam konteks perkotaan seperti Makassar, perluasan ekonomi digital, jasa pengantaran, perdagangan kecil, konten media sosial, dan kerja informal berbasis platform dapat memperluas bentuk pekerjaan anak yang tidak mudah ditangkap oleh metode pendataan konvensional. Oleh karena itu, pendataan pekerja anak perlu diperluas dari sekadar anak di jalan menjadi anak dalam ekosistem kerja keluarga, kerja jasa, dan kerja digital informal.

### 3.5. Gender sebagai dimensi analisis pekerja anak

Analisis gender memperlihatkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda. Anak laki-laki lebih mungkin terlibat dalam pekerjaan yang terlihat di ruang publik, seperti membantu berdagang, menjadi pengamen, pengemis, pemulung, buruh angkut, atau pekerja informal lain. Karena terlihat, anak laki-laki lebih mungkin masuk dalam operasi penjangkauan atau pendataan sosial. Sebaliknya, anak perempuan lebih mungkin mengalami kerja tersembunyi, seperti pekerjaan rumah tangga, merawat adik, membantu usaha keluarga di rumah, menjadi pekerja domestik, atau bekerja di sektor jasa yang tidak selalu mudah diidentifikasi oleh petugas sosial.

Data global menunjukkan bahwa anak laki-laki memang lebih banyak tercatat dalam pekerja anak, tetapi ketika pekerjaan rumah tangga tidak dibayar selama 21 jam atau lebih per minggu dimasukkan, kesenjangan gender dapat berbalik (UNICEF, 2025). Temuan ini penting untuk Makassar karena data ketenagakerjaan orang dewasa menunjukkan beban mengurus rumah tangga sangat didominasi perempuan. Jika pola gender tersebut

direproduksi pada anak, maka anak perempuan dapat mengalami beban ganda sejak dini: bersekolah, membantu pekerjaan domestik, dan dalam beberapa kasus ikut bekerja secara ekonomi.

Dalam pekerjaan sosial, pembacaan semacam ini menuntut asesmen keluarga yang lebih sensitif gender dan secara eksplisit terhubung dengan pendekatan case management serta family-centered social work. Petugas sosial tidak hanya perlu bertanya apakah anak bekerja atau tidak, tetapi juga berapa jam anak membantu pekerjaan rumah tangga, apakah aktivitas tersebut mengganggu sekolah, apakah anak mendapatkan waktu istirahat, serta apakah anak perempuan memikul tugas pengasuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Melalui case management, pekerja sosial dapat menghubungkan asesmen anak dengan rencana layanan, rujukan sekolah, dukungan keluarga, bantuan sosial, dan pemantauan berkelanjutan. Tanpa pertanyaan dan rencana layanan semacam ini, kerja anak perempuan akan tetap tersembunyi dan program perlindungan anak berisiko hanya menjangkau anak laki-laki yang terlihat di ruang publik.

### **3.6. Implikasi bagi Program Studi Kesejahteraan Sosial**

Bagi Program Studi Kesejahteraan Sosial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja anak di Makassar dapat dijadikan lokus pengembangan tiga kompetensi utama: asesmen kerentanan keluarga, intervensi perlindungan anak, dan advokasi kebijakan sosial. Pertama, asesmen kerentanan keluarga perlu menggabungkan data kemiskinan, status sekolah, pekerjaan orang tua, beban pengasuhan, dan riwayat kekerasan. Anak yang bekerja tidak boleh dipandang sebagai pelaku pelanggaran, melainkan sebagai korban kondisi keluarga dan struktur sosial yang menempatkannya pada situasi rentan.

Kedua, intervensi pekerja sosial perlu diarahkan pada case management berbasis keluarga. Anak jalanan atau anak yang bekerja tidak cukup ditertibkan, tetapi perlu dipetakan keluarganya, sumber pendapatannya, relasi sekolah, kondisi tempat tinggal, risiko kekerasan, dan akses bantuan sosial. Dengan demikian, tindakan sosial tidak berhenti pada penjangkauan jalanan, tetapi berlanjut pada pemulihan keluarga dan pencegahan anak kembali bekerja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip layanan sosial berbasis komunitas, berbasis jalan, dan berbasis pusat layanan sebagaimana ditemukan dalam studi layanan anak jalanan di Makassar.

Ketiga, advokasi kebijakan perlu menempatkan gender sebagai dimensi utama. Program pencegahan pekerja anak harus memiliki indikator yang membedakan pengalaman anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak laki-laki dapat diprioritaskan pada penjangkauan ruang publik dan pekerjaan informal luar rumah, sedangkan anak perempuan perlu dijangkau melalui sekolah, posyandu remaja, puskesmas, pekerja sosial masyarakat, dan kunjungan keluarga. Kebijakan yang netral gender sering kali tidak cukup karena bentuk kerja anak perempuan lebih tersembunyi daripada anak laki-laki.

Keempat, sistem data perlindungan anak perlu diperkuat. Satu Data Kota Makassar sudah menyediakan indikator sosial penting, tetapi indikator pekerja anak berbasis usia, jenis kelamin, lokasi, status sekolah, dan jenis pekerjaan masih perlu dikembangkan. Integrasi data Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DP3A, kelurahan, pekerja sosial masyarakat, dan sekolah akan membantu mengidentifikasi anak yang berisiko lebih dini. Data yang lebih rinci juga memungkinkan intervensi berbasis bukti dan mengurangi kemungkinan anak hanya tercatat ketika sudah berada di jalan atau telah menjadi korban kekerasan.

#### 4. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa kerentanan pekerja anak di Kota Makassar dibentuk oleh interaksi antara struktur demografis anak yang besar, tekanan ekonomi keluarga, ketimpangan gender dalam kerja orang dewasa, dan keberadaan masalah sosial anak seperti anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak korban kekerasan. Data BPS dan Satu Data Kota Makassar menunjukkan bahwa isu pekerja anak perlu dibaca secara hati-hati karena angka pekerja anak aktual pada tingkat kota belum tersedia secara terbuka. Namun, prevalensi pekerja anak Sulawesi Selatan sebesar 5,28 persen pada 2024 dan estimasi penduduk usia 10-17 tahun Makassar sekitar 214 ribu jiwa menunjukkan bahwa risiko pekerja anak tetap signifikan.

Artikel ini menunjukkan bahwa pekerja anak berbasis gender di kota tidak hanya tampak melalui kerja publik yang terlihat, tetapi juga melalui kerja domestik, pengasuhan, dan reproduksi beban keluarga yang sering tidak tercatat dalam statistik. Temuan utama artikel ini menegaskan pentingnya perspektif gender: anak laki-laki lebih mudah terlihat dalam kerja publik, sedangkan anak perempuan lebih rentan mengalami kerja domestik dan perawatan keluarga yang tersembunyi. Dampak penelitian ini adalah perlunya program kesejahteraan sosial yang menggabungkan pendataan berbasis gender, manajemen kasus keluarga, penguatan sekolah, layanan perlindungan anak, dan advokasi bantuan sosial. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan estimasi indikatif, sehingga penelitian lanjutan perlu mengombinasikan survei kuantitatif rumah tangga dengan studi lapangan kualitatif melalui wawancara anak, keluarga, sekolah, pekerja sosial, dan pemetaan titik kerja informal. Kombinasi metode tersebut diperlukan agar gambaran pekerja anak di tingkat kota menjadi lebih komprehensif dan mampu menangkap pengalaman anak laki-laki maupun anak perempuan secara lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase pekerja anak (usia 10–17 tahun) menurut jenis kelamin*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase pekerja anak (usia 10–17 tahun) menurut provinsi*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Kota Makassar 2024*. BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2025a). *Kota Makassar dalam angka 2025*. BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2025b). *Statistik ketenagakerjaan Kota Makassar 2024*. BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 7,77 persen*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Better Work Indonesia. (2024). *About child labour*. International Labour Organization.
- Bunda, M., & Zulkifli. (2025). Analisis pengaruh Program Keluarga Harapan dalam mengurangi pekerja anak di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7(3), 453–458.

- Ginting, S. N., & Barus, S. H. (2025). Vulnerability and poverty cycle of child labor in the urban informal sector: A case study of Kramat Jati Wholesale Market, Jakarta. *ARISTO*, 13(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v13i2.11527>
- International Labour Organization. (2025). *2024 global estimates of child labour in figures*. ILO.
- International Labour Organization, & UNICEF. (2025). *Child labour: Global estimates 2024, trends and the road forward*. ILO & UNICEF.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Puyo, S. A., Abdul, I., & Djuuna, R. F. (2025). Pengaruh kemiskinan, pengeluaran per kapita non makanan dan anggaran belanja pendidikan terhadap tingkat pekerja anak di Indonesia. *Jurnal Economic Resources*, 8(2), 1181–1191.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya penanganan anak jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.247>
- Satu Data Kota Makassar. (2024). *Kategori sosial: Data sektoral Dinas Sosial Kota Makassar*. Pemerintah Kota Makassar.
- Solong, A., Rahman, M., Aras, D., & Alim, A. (2023). Street child management policy at Social Office of Makassar City, Indonesia. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 11(4), 34–51. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v11.i4.2023.5128>
- Sukma, W. L., & Ruslan, K. (2025). Digital economy challenge: Hidden exploitation of child labour through the use of digital devices. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(2), 259–290. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i2.252>
- UNICEF. (2025). *Despite progress, child labour still affects 138 million children globally*. UNICEF.
- Utami, E. D., & Usman, H. (2022). Pengaruh kemiskinan terhadap pekerja anak di Indonesia: Analisis data Susenas 2020. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 5(2), 1–12.